



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 2017 merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Demikian Renja SKPD ini disusun kiranya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 khususnya program kegiatan pembangunan perkebunan di provinsi Sumatera Utara ke depan

MEDAN, Juni 2016
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. HERAWATI N, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
SK Penetapan Renja	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9
3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
4. Rivew Terhadap Rancangan RKPD	26
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017	
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah	43
2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	46
3. Program dan Kegiatan Tahun 2017	47
BAB IV PENUTUP	64

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang secara ekonomis memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pengertian perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Dalam penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada RKPD, RPJPD, RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

A. Proses Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Perumusan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah dan arahan menteri terkait.

B. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD yang tertuang dalam KUA-PPAS dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah:

1. UU No. 24 tahun 1956 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

16. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan perkebunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program pembangunan perkebunan yang berorientasi perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan perkebunan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program dilaksanakan melalui evaluasi pembangunan perkebunan dalam rangka peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk perkebunan untuk mendukung daya saing usaha perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara melakukan penelaahan terhadap situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan dapat ditentukan kegiatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui pendekatan statistik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, sehingga di dalamnya tercantum indikator keluaran, hasil dan manfaat dari pembangunan perkebunan tersebut. Program di atas merupakan program prioritas dalam mencapai peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD s/d 2015.

Dari hasil evaluasi tampak bahwa pelaksanaan program kerja pada tahun 2015 sudah menunjukkan konsistensi, hal ini sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan dimana program pembangunan perkebunan yang didanai dari APBD Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui 5 program pendukung dan 2 program prioritas. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada 4 (empat) program yaitu 2 pada program pendukung dan 2 pada program prioritas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 76 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 80 persen. Hal ini dikarenakan tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Realisasi keuangan sebesar 70,26 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak empat kegiatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 95 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 75 persen. Realisasi keuangan sebesar 60,90 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak enam kegiatan dari delapan kegiatan yang direncanakan.

3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 2,57 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 2,32 persen. Realisasi keuangan sebesar 50,50 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak tiga puluh enam kegiatan dari enam puluh tujuh kegiatan.

4. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 8,73 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 10,50 persen. Realisasi keuangan sebesar 71,60 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak empat belas kegiatan dari delapan belas kegiatan yang direncanakan.

Rendahnya realisasi pencapaian indikator pada masing masing program dikarenakan antara lain karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang ada pada renja tahun 2015. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan tersebut antara lain dikarenakan tidak

tersediaan anggaran pada tahun 2015.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada 3 (tiga) program yaitu pada program pendukung. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 100 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 100 persen. Hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan. Realisasi keuangan sebesar 94,67% dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 96 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar 100 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak satu kegiatan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2015 target kinerja yang ditargetkan sebesar 95 persen dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar 98,52 persen dengan jumlah kegiatan yang terlaksana sebanyak delapan kegiatan.

C. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Rendahnya pencapaian realisasi anggaran keuangan dimaksud karena kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada P.APBD TA.2015 tidak dapat terealisasi karena waktu yang sudah sangat mendesak. DPA P.APBD baru di sahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2015. Alokasi dana pada kegiatan P.APBD tersebut yaitu sebesar Rp. 2.808.799.626,- yang merupakan kegiatan pengembangan peningkatan produksi tembakau yang berasal dari sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau). Sisa dana lainnya yang tidak digunakan pada alokasi dana APBD murni hanya untuk tujuan efisiensi.

Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat

di masing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan Iptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong petani untuk mampu mengembangkan dirinya serta kelompoknya ke dalam kelembagaan ekonomi/koperasi serta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien dan berdaya saing tinggi, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan Sumatera Utara diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Perkebunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha pekebunan melalui penerapan Sistem Agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Sumatera Utara, akan ditempuh kebijaksanaan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi perkebunan Sumatera Utara terutama perkebunan rakyat melalui Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan dengan kegiatan-kegiatan utama yaitu :

1. Penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan,
2. Penerapan dan pengembangan paket teknologi produksi dan peningkatan produk mutu hasil perkebunan,
3. Optimalisasi pemberdayaan sumberdaya lahan dan air untuk mendukung sub sektor perkebunan,
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pedesaan dalam pembangunan perkebunan,
5. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petugas serta petani dan kelembagaannya melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan,
6. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan usaha dalam peningkatan posisi tawar (bargaining position) petani,
7. Meningkatkan akses petani dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap sumber dana permodalan non bank.
8. Fasilitasi penataan kelembagaan perkebunan melalui pengembangan jejaring kerjasama, pengembangan kelembagaan petani, pemasaran hasil serta kelembagaan usaha lainnya di sentra perkebunan rakyat.
9. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di sentra-sentra perkebunan rakyat melalui penyebaran unit pengolahan hasil dan peningkatan volume hasil perkebunan rakyat baik di pasar lokal maupun pasar luar negeri.
10. Pengembangan sarana dan prasarana pada sentra produksi perkebunan rakyat melalui pengembangan sarana produksi (pupuk dan pestisida), alat dan mesin perkebunan dan pengembangan jalan usaha tani di sentra produksi perkebunan rakyat Sumatera Utara.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		Thn 0 (2013) *	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(9)
VI	Fokus Urusan Pilihan									
6.1.	Pertanian									
	Subsektor Perkebunan									
I	Luas Areal	1,103,153.58	1,105,013.82	1,106,877.60	1,108,744.93	1,110,615.89	1,112,490.49	1,128,965.71	1,072,121.00	1,112,490.49
	1. K. Sawit (Ha)	379,824.70	380,584.35	381,345.52	382,108.21	382,872.43	383,638.17	416,475.11	416,552.00	383,638.17
	2. Karet (Ha)	407,505.49	408,361.25	409,218.81	410,078.17	410,939.33	411,802.30	395,124.00	395,124.00	411,802.30
	3. Kopi Arabika (Ha)	59,029.36	59,117.90	59,206.58	59,295.39	59,384.33	59,473.41	61,231.44	61,285.00	59,473.41
	3. Kopi Robusta (Ha)	20,988.98	20,995.27	21,001.57	21,007.87	21,014.18	21,020.48	20,853.81	20,895.00	21,020.48
	4. Kelapa (Ha)	110,204.93	110,254.52	110,304.13	110,353.77	110,403.43	110,453.11	110,122.13	110,130.00	110,453.11
	5. Kakao (Ha)	66,546.22	66,612.77	66,679.38	66,746.06	66,812.81	66,879.62	64,934.36	64,965.00	66,879.62
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	59,053.90	59,087.75	59,121.60	59,155.45	59,189.38	59,223.39	60,224.86	3,170.00	59,223.39
II	Produktivitas (kg/ha/tahun)							2.35	2.32	
III	Produksi	6,245,195.94	6,396,329.68	6,553,039.76	6,716,865.75	6,888,145.83	7,067,296.63	6,269,429.74	6,451,234.00	7,067,296.63
	1. K. Sawit (ton/Ha)	5,711,147.33	5,849,357.10	5,992,666.34	6,142,483.00	6,299,116.32	6,461,003.61	5,745,235.23	5,875,321.00	6,461,003.61
	2. Karet (ton/Ha)	295,045.79	302,185.90	309,589.45	317,329.19	325,421.08	334,958.65	332,673.82	334,154.00	334,958.65
	3. Kopi Arabika (ton/Ha)	51,916.59	53,172.97	54,475.71	55,837.60	57,261.46	58,939.70	49,176.51	52,124.00	58,939.70
	3. Kopi Robusta (ton/Ha)	8,830.13	9,043.82	9,265.39	9,497.03	9,739.20	10,024.65	8,887.52	11,127.00	10,024.65
	4. Kelapa (ton/Ha)	96,400.19	98,733.07	101,152.03	103,680.84	106,324.70	109,440.90	91,662.47	94,856.00	109,440.90
	5. Kakao (ton/Ha)	39,645.30	40,604.72	41,599.53	42,639.52	43,726.83	45,008.39	41,265.77	44,315.00	45,008.39
	6. Komoditi Lainnya (ton/Ha)	42,210.61	43,232.11	44,291.29	45,398.58	46,556.24	47,920.73	528.42	39,337.00	47,920.73

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		Thn 0 (2013) *)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(9)
IV	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sumatera Utara (%)									
	1. ADHB	9.75	9.75	9.76	9.76	9.77	9.77	11.80	10,50	9.77
	2. ADHK	9.81	9.81	9.82	9.82	9.83	9.83	13.44	13,53	9.83

Dari hasil pengukuran kinerja diatas diketahui bahwa realisasi capaian kinerja masing masing indikator sebagai berikut:

1. Produktivitas/ Laju pertumbuhan

Realisasi produksi perkebunan rakyat pada tahun 2015 sebesar 6,451,234.00 ton atau mengalami peningkatan sebesar 146.489,58 ton atau mengalami peningkatan produktivitas sebesar 2,32%/tahun dari tahun 2014 sebesar 6,304,744.42 ton. Hal ini menggambarkan bahwa indikator produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2015 dapat *belum tercapai* dari target yang direncanakan sebesar 2,57%/tahun. Apabila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada tahun 2014 maka pertumbuhan produksi pada tahun 2015 lebih kecil dari tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi harga jual karet dan Crude Palm Oil (CPO) yang rendah sehingga para petani karet maupun kelapa sawit kurang aktif memberikan pupuk kepada tanaman karet atau kelapa sawit dikarenakan biaya produksi yang lebih besar dari hasil panen yang diterima.

2. Produksi

Realisasi capaian produksi perkebunan rakyat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 pencapaian produksi *belum mencapai target yang ditetapkan* yaitu sebesar 6,451,234.00 ton dari target yang diinginkan sebesar 6.570.323,89 ton. Peningkatan produksi terbesar pada komoditas sawit 130,086 ton TBS, karet sebesar 1.480,00 ton, kopi arabika 2.947,49 ton, kopi robusta 2,239,48 ton, kelapa 3.194,00 ton dan kakao sebesar 3.049,00 ton. Peningkatan produksi perkebunan rakyat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel II 3. Produksi Perkebunan Rakyat 2014-2015

No	Komoditi		Perkebunan Rakyat		
			Tahun 2014 (ton)	Tahun 2015 (ton)	Selisih (ton)
1	Karet		332,674.00	334,154.00	1,480.00
2	Kelapa Sawit	TBS	5,745,235.00	5,875,321.00	130,086.00
		MS	1,263,952.00	1,282,025.00	18,073.00
		IS	172,357.00	183,124.00	10,767.00
3	Kopi Arabika		49,176.51	52,124.00	2,947.49
	Kopi Robusta		8,887.52	11,127.00	2,239.48
4	Kelapa		91,662.00	94,856.00	3,194.00
5	Kakao		41,266.00	44,315.00	3,049.00
6	Cengkeh		528.42	612.00	83.58
7	Kemenyan		4,968.82	5,124.00	155.18
8	Kulit Manis		3,408.72	3,725.00	316.28
9	Nilam		293.00	324.00	31.00
10	Kemiri		12,583.27	12,854.00	270.73
11	Tembakau		1,519.78	1,895.00	375.22
12	Tebu		3,408.38	5,214.00	1,805.62
13	Pala		40.65	51.00	10.35
14	Lada		95.53	98.00	2.47
15	Kapuk		133.65	141.00	7.35
16	Gambir		1,833.54	1,912.00	78.46
17	Aren		3,233.25	3,468.00	234.75
18	Pinang		3,675.38	3,780.00	104.62
19	Vanili		88.20	95.00	6.80

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		
		Tahun 2014 (ton)	Tahun 2015 (ton)	Selisih (ton)
20	Jarak	9.00	12.00	3.00
21	Kapulaga	18.80	24.00	5.20
22	Jambu Mete	5.00	8.00	3.00
	Jumlah	6,304,744.42	6,451,234.00	146,489.58

3. Luas

Realisasi capaian kinerja Luas areal perkebunan khususnya perkebunan rakyat telah dapat *dicapai* hal ini dikarenakan subsektor perkebunan masih menjadi komoditas primadona bagi masyarakat Sumatera Utara sebagai mata pencahariannya. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2015 seluas 1,129,704.00 Ha atau meningkat seluas 845.29 Ha dari tahun 2014 seluas 1,128,858.71 Ha. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II 4. Luas Perkebunan Rakyat 2014-2015

No	Komoditi	Perkebunan Rakyat		
		Tahun 2014 (Ha)	Tahun 2015 (Ha)	Selisih (Ha)
1	Karet	395,017.00	395,124.00	107.00
2	Kelapa Sawit	416,475.11	416,552.00	76.89
3	Kopi Arabika	61,231.44	61,285.00	53.56
	Kopi Robusta	20,853.81	20,895.00	41.19
4	Kelapa	110,122.13	110,130.00	7.87
5	Kakao	64,934.36	64,965.00	30.64
6	Cengkeh	3,168.25	3,170.00	1.75
7	Kemenyan	22,897.80	22,900.00	2.20
8	Kulit Manis	5,712.20	5,752.00	39.80
9	Nilam	832.00	834.00	2.00
10	Kemiri	10,968.00	10,988.00	20.00
11	Tembakau	1,691.00	1,702.00	11.00
12	Tebu	900.00	1,185.00	285.00
13	Pala	140.70	142.00	1.30
14	Lada	162.70	182.00	19.30
15	Kapuk	471.65	480.00	8.35
16	Gambir	2,003.40	2,006.00	2.60
17	Aren	5,288.91	5,416.00	127.09
18	Pinang	5,719.15	5,720.00	0.85
19	Vanili	207.60	210.00	2.40
20	Jarak	19.00	21.00	2.00
21	Kapulaga	25.50	28.00	2.50
22	Jambu Mete	17.00	17.00	-
	Jumlah	1,128,858.71	1,129,704.00	845.29

Secara umum potensi perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel II 5. Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Usaha dan Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (estimasi angka sementara)

No	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karet	395,124.00	334,154.00	38,529.85	35,107.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,190.85	560,681.84

No	Jenis Komoditas		Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
			Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kelapa Sawit	TBS	416,552.00	5,875,321.00	286,529.39	4,699,427.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,277.39	18,606,490.99
		MS		1,282,025.00		1,092,587.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,141,595.96
		IS		183,124.00		188,301.15		215,075.43		106,194.28	-	692,694.86
3	Kopi Arabika		61,285.00	52,124.00	-	-					61,285.00	52,124.00
	Kopi Robusta		20,895.00	11,127.00	-	-	810.00	776.00	-	-	21,705.00	11,903.00
4	Kelapa		110,130.00	94,856.00	-	-	1,851.00	2,146.00	1,140.00	1,349.00	113,121.00	98,351.00
5	Kakao		64,965.00	44,315.00	-	-	441.00	353.00	-	-	65,406.00	44,668.00
6	Cengkeh		3,170.00	612.00	-	-	-	-	-	-	3,170.00	612.00
7	Kemenyan		22,900.00	5,124.00	-	-	-	-	-	-	22,900.00	5,124.00
8	Kulit Manis		5,752.00	3,725.00	-	-	-	-	-	-	5,752.00	3,725.00
9	Nilam		834.00	324.00	-	-	-	-	-	-	834.00	324.00
10	Kemiri		10,988.00	12,854.00	-	-	-	-	-	-	10,988.00	12,854.00
11	Tembakau		1,702.00	1,895.00	580.00	225.00	-	-	-	-	2,282.00	2,120.00
12	Tebu		1,185.00	5,214.00	6,972.10	31,082.16	-	-	-	-	8,157.10	36,296.16
13	Pala		142.00	51.00	-	-	-	-	-	-	142.00	51.00
14	Lada		182.00	98.00	-	-	-	-	-	-	182.00	98.00
15	Kapuk		480.00	141.00	-	-	-	-	-	-	480.00	141.00
16	Gambir		2,006.00	1,912.00	-	-	-	-	-	-	2,006.00	1,912.00
17	The		-	-	3,904.08	6,948.00	-	-	-	-	3,904.08	6,948.00
18	Aren		5,416.00	3,468.00	-	-	-	-	-	-	5,416.00	3,468.00
19	Pinang		5,720.00	3,780.00	-	-	-	-	-	-	5,720.00	3,780.00
20	Vanili		210.00	95.00	-	-	-	-	-	-	210.00	95.00
21	Jarak		21.00	12.00	-	-	-	-	-	-	21.00	12.00
22	Kapulaga		28.00	24.00	-	-	-	-	-	-	28.00	24.00
23	Jambu Mete		17.00	8.00	-	-	-	-	-	-	17.00	8.00
24	Sereh Wangi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :			1,129,704.00	2,041,062.00	336,515.42	1,354,251.69	451,349.00	1,521,129.32	208,626.00	763,167.82	2,126,194.42	5,679,610.83

*) Estimasi angka sementara 2015

NB: Perhitungan produksi kelapa sawit berdasarkan satuan Minyak Sawit (MS) dan Inti Sawit (IS)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 2,126,194.42 ha dengan total produksi sebesar 5,679,610.83 ton yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 1,129,704.00 ha (53,13%) dengan total produksi mencapai 2,041,062.00 ton (35,94%). Sedangkan luas perkebunan PTPN mencapai 336,515.42 ha (15,83%) dengan total produksi sebesar 1,354,251.69 ton (23,84%), PBSN seluas 451,349.00 ha (21,23%) total produksi 1,521,129.32 ton (26,78%) dan PBSA seluas 208,626.00 ha (9,81%) dengan total produksi sebesar 763,167.82 ton (13,44%).

4. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Sumatera Utara

Tahun 2015, nilai PRDB HDHB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 125,81 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHK tahun 2012 mencapai 110,12 triliun rupiah. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara sebesar 22,01 persen, menurun bila dibandingkan tahun lalu sebesar 23,27 persen. Namun meskipun demilian laju pertumbuhannya mengalami akselerasi dari 4,39 pesen pada tahun 2014 menjadi 5,60 persen pada tahun 2015.

Sublapangan usaha perkebunan tahunan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu sebesar 47,73 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan ADHB sebesar 10,50 persen dan ADHHK 2010 sebesar 13,53 persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Koordinasi dan Sinergi Program Antara SKPD Dinas Perkebunan Provinsi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/ Kota

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan koordinasi dan sinergi program dengan kabupaten/ kota mengupayakan agar sasaran Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara dapat dicapai melalui pendekatan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan,
2. Penerapan dan pengembangan paket teknologi produksi dan peningkatan produk mutu hasil perkebunan,
3. Optimalisasi pemberdayaan sumberdaya lahan dan air untuk mendukung subsektor perkebunan,
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam pembangunan usaha perkebunan,
5. Peningkatan kapasitas SDM petugas serta petani dan kelembagaannya melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan,
6. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan usaha dalam peningkatan posisi tawar (Bargaining position) petani,
7. Meningkatkan akses petani dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap sumber dana permodalan non bank

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

- 1) Keterbatasan Modal dan SDM petani,
- 2) Kelembagaan petani belum optimal karena pembentukannya bukan atas kesadaran sendiri,
- 3) Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal.
- 4) Kewenangan sebagian besar telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

- 5) Infrastruktur/ jalan produksi perkebunan yang belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.
 - 6) Keterbatasan areal dalam pengembangan swasembada tebu.
 - 7) Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/ konvensional,
 - 8) Usaha tani tanaman perkebunan masih diusahakan secara monokultur,
 - 9) Mutu hasil produk perkebunan masih rendah, kurang didukung oleh Unit Pengolahan yang efisien dan terbatas pada produk primer, sehingga peluang untuk memperoleh nilai tambah belum maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :
- 1) Ancaman kerusakan sumber daya alam akibat pengelolaan yang tidak tepat.
 - 2) Belum memadainya sarana dan prasarana.
 - 3) Terbatasnya akses petani terhadap sumber daya dan infrastruktur.
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam belum maksimal.
 - 5) Kemitraan belum berkembang secara maksimal.
 - 6) Rantai pemasaran yang panjang.
 - 7) Rendahnya investasi dan fungsi intermediasi perbankan.
 - 8) Kewenangan sebagian besar telah di serahkan pada Kabupaten/Kota.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara
- 1) Terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan sehingga meningkatkan pendapatan petani pekebun.
 - 2) Meningkatnya kemampuan petani untuk menghasilkan komoditas yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
 - 3) Meningkatnya intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan.
 - 4) Meningkatnya ekspor komoditas hasil perkebunan,
 - 5) Meningkatnya diversifikasi produksi tanaman perkebunan.
4. Peluang dan Tantangan Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dalam Pembangunan Perkebunan Sumatera Utara
- 1) Peluang Pembangunan Perkebunan ;
 - a. Pengembangan komoditas perkebunan :
 - Pasar komoditas masih terbuka, dan adanya peluang baru pasar ekspor ke Negri Cina, Afrika, Timur Tengah dan India,
 - Tersedianya hasil rakitan teknologi maju dari Lembaga Penelitian,
 - Besarnya minat dan dorongan pemanfaatan agribisnis dari pemerintah,

- b. Usahatani tanaman perkebunan :
 - Diversifikasi usaha,
 - Tersedianya dukungan Iptek,
 - Tersedianya SDM yang terlatih,
- c. Produktivitas :
 - Tersedianya paket teknologi alternatif yang tepat,
 - Peremajaan tanaman tua,
 - Intensifikasi tanaman menghasilkan.
- d. Pengolahan mutu hasil :
 - Tersedianya bahan baku untuk industri hilir,
 - Tersedianya hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan produk olahan,
 - Meningkatnya permintaan terhadap produk perkebunan bermutu,
- e. Kelembagaan :
 - Peran kelembagaan petani dapat ditingkatkan,
 - Tersedianya Peraturan perundang undangan yang mendukung UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

2) Tantangan Pembangunan Perkebunan

- a. Komoditas yang dikembangkan :
 - Terbatasnya penyediaan data dan informasi teknologi, sumber daya dan pasar,
 - Terbatasnya dukungan infrastruktur,
 - Hambatan tarif dan non tarif,
 - Kelembagaan yang belum baik,
 - Munculnya negara pesaing baru,
- b. Usahatani tanaman perkebunan :
 - Terbatasnya infrastruktur seperti jalan produksi di wilayah pengembangan,
 - Terbatasnya akses pekebun ke sumber pendanaan,
- c. Produktivitas :
 - Terbatasnya benih unggul,
 - Belum lancarnya esiminasi teknologi anjuran,
 - Semakin menyempitnya ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat,
 - Degradasi kesuburan tanah.
- d. Pengolahan dan mutu hasil :
 - Belum adanya kebijakan yang terintegrasi antara hulu hilir secara nasional,

- Belum tersedianya roadmap pengembangan komoditi perkebunan,
 - Produk bermutu belum mendapat insentif yang proporsional,
 - Semakin ketatnya tuntutan konsumen atas mutu produk,
 - Rendahnya minat investor,
- e. Kelembagaan :
- Budaya masyarakat yang masih individu mengolah usahanya,
 - PPN, Pungutan retribusi,
 - Kelembagaan komoditi belum berorientasi pengembangan komoditi,
 - Belum adanya kebijakan penghimpunan dana dari komoditi untuk komoditi.

5. Formulasi Isu-isu Penting

- 1) Produktivitas tanaman perkebunan rakyat yang masih rendah (tanaman tua dan penggunaan benih tidak unggul/tidak bersertifikat)
- 2) Adanya konflik kepentingan komoditi pertanian sebagai bahan pangan dan juga sebagai sumber energi pengganti bahan baku fosil (energi alternatif).
- 3) Perkebunan Sumatera Utara masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar yang menggunakan modal dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif serta manajemen eksploitatif terhadap SDA dan SDM, dan perkebunan rakyat yang subsisten dan tradisional serta luas lahan terbatas.
- 4) Masuknya pemodal besar ke usaha perkebunan masih belum memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat setempat. Hingga saat ini masih belum ada re-distribusi aset dan manfaat yang adil (proporsional) kepada masyarakat dari usaha perkebunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala Prioritas Primer, Sekunder dan Tersier Program dan kegiatan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit Eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tersebut kedalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Rencana Kerja

tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Rencana Kerja tersebut. Dari Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Adapun Kajian Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II.6.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjangking aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah hasil dari usulan dari kelompok-kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi yang ditujukan kepada SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan pelaksanaan forum SKPD

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan program dan kegiatan prioritas Dinas Perkebunan Sumatera Utara lam rangka menjawab isu dan pencapaian target pembangunan perkebunan tahun 2016. Usulan masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.7.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah

a. Kebijakan Nasional

Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dapat dicermati beberapa hal penting sebagai berikut :

- 1) RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, memuat (1) Prioritas pembangunan nasional, (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
- 2) Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdiri dari 9 (sembilan) Agenda pembangunan (Nawa Cita) adalah sebagai berikut :
 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
 6. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Dasar-Dasar Strategi Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
3. Membangun dari pinggir dan dari desa

4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas, dan penerapan teknologi yang tepat
5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Kebijakan Daerah

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2015 serta perkiraan pada tahun 2016 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Menilik kepada Visi Pembangunan Jangka Panjang Tahap III Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yakni : “Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada daya saing daerah yang dilandaskan kepada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi”, dan Tema RKP Tahun 2017, maka ditentukan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah :

“KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”

Dengan mendasarkan kepada sasaran utama pembangunan nasional, maka sasaran utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15persen
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,41 persen
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,00 – 9,31 persen
4. Laju inflasi 4,5 – 4,00 persen

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diarahkan kepada :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian

5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi
7. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
8. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah

Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, sektor dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN).

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel III 1. Isu strategis Provinsi Sumatera Utara

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
Prioritas 5 : Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk	1. Penguatan ketahanan pangan (<i>food security</i>) dan penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi untuk terwujudnya swasembada pangan (kedele, daging dan ikan) dan swasembada berkelanjutan (beras, jagung)

PRIORITAS	ISU STRATEGIS
Pertanian, Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diversifikasi pangan untuk penguatan Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Peningkatan infrastruktur Pertanian meliputi irigasi, jalan usahatani dan jalan produksi 4. Peremajaan Tanaman Tidak Menghasilkan di Perkebunan 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan 6. Peningkatan kelembagaan petani dan nelayan 7. Peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan 8. Penyediaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan 9. Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan 10. Pengendalian inflasi komoditi pertanian 11. Pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan 12. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan perhutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Tabel III.2. Sasaran Pembangunan dicapai pada prioritas Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.103.066,63 Ha. 2) Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.912.378,18 ton. 3) Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2.57 % 4) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 – 5 tahun dan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta secara kolektif menggambarkan strategi Dinas Perkebunan dalam melakukan

perbaikan-perbaikan sesuai dengan kewenangan/ urusan yang ada. Pembangunan perkebunan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan;
2. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai pendorong perekonomian Sumatera Utara melalui penyediaan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan pengembangan sistem usaha agribisnis berbasis perkebunan, secara rinci indikator kinerja utama yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III. 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2017
1	2	3	6
1.	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1. Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan rakyat	2,57%
		2. Produksi perkebunan rakyat (ton)	6,888,145.83
		3. Luas areal perkebunan rakyat (ha)	1,110,615.89

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Prioritas pembangunan perkebunan kedepannya diarahkan kepada sinergisitas seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk perkebunan untuk mendukung daya saing usaha perkebunan melalui pengembangan, peremajaan, intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi peralatan perkebunan, peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemitraan usaha serta investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program pendukung dan 2 (dua) proram utama antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan.

Program ini dimaksud untuk mendukung peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman guna mendukung perluasan dan percepatan

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peningkatan SDM dan pengusaha Iptek.

7. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi.

Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi : dimaksudkan untuk meningkatkan pengolahan dan perkebunan guna mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah serta mutu hasil perkebunan.

Rencana pembangunan perkebunan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel III. 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ini disusun sebagai pedoman Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2017. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renja ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran-saran untuk perbaikan pada Renja berikutnya.

MEDAN, Juni 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. HERAWATI N, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001